

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KURIR DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)

Oleh

Alifvio Bramandika Karindra

Perusahaan menyebut kurir sebagai mitra, bukan pekerja tetap, sehingga tidak dijamin oleh perlindungan penuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam aspek perlindungan terhadap kurir, baik dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, maupun tanggung jawab perdata. Terjadi insiden mengejutkan di Kota Malang ketika seorang kurir COD bernama Ipan menjadi korban kekerasan saat mengantarkan paket di Lowokwaru. Kejadian bermula ketika pria paruh baya memprotes aturan bahwa paket COD tidak boleh dibuka sebelum dibayar dan menuduh kurir bisa terlibat penipuan. Saat adu argumen berlangsung, pria itu bahkan mengancam akan memukul Ipan dengan ember. Secara tiba-tiba, anak pria tersebut berlari dari dalam rumah dan menendang perut sang kurir. Merasa trauma dan belum pernah mengalami kejadian seperti itu selama empat bulan bekerja, Ipan berencana melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia. Untuk mendeskripsikan alternatif pengaturan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir hanya berwenang mengantarkan barang dan menerima pembayaran atas kuasa dari penjual sesuai Pasal 1792–1819 dan Pasal 1382–1456 KUHPperdata. Dalam sistem COD, transaksi belum dianggap selesai sebelum pembeli membayar barang kepada kurir, sehingga paket tidak boleh dibuka sebelum pembayaran dilakukan. Jika barang tidak sesuai setelah dibuka, pembeli tetap wajib membayar, sementara proses pengembalian dapat diajukan melalui fitur komplain pada marketplace. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui pengaturan internal perusahaan dan edukasi konsumen, serta upaya regresif melalui penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku kekerasan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kurir COD.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Kurir, COD

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS FOR COURIERS IN THE CASH ON DELIVERY (COD) SYSTEM

By

Alifvio Bramandika Karindra

Companies classify couriers as partners rather than permanent employees, resulting in the absence of full protection under the Labor Law. This situation creates a legal vacuum regarding courier protection, whether in terms of labor rights, consumer protection, or civil liability. A shocking incident occurred in Malang City, where a COD courier named Ipan became a victim of violence while delivering a package in Lowokwaru. The incident began when an elderly man protested the rule that COD packages cannot be opened before payment and accused the courier of potentially enabling fraud. During the argument, the man even threatened to hit Ipan with a bucket. Suddenly, the man's son ran out from inside the house and kicked the courier in the stomach. Feeling traumatized and having never experienced such treatment during his four months of work, Ipan intends to report the incident to the police.

The purpose of this study is to analyze the legal protection for couriers in COD transactions under Indonesian civil law and to describe alternative legal arrangements to fill the existing legal vacuum regarding courier protection in the COD system. The method used in this research is normative juridical.

The findings of this study indicate that a courier's responsibility is limited to delivering goods from the seller to the buyer, in accordance with the authority granted by the seller as regulated in Articles 1792–1819 of the Indonesian Civil Code concerning the law of agency. In addition, couriers also play a role in receiving payments from buyers, which are then transferred back to the parent company and subsequently to the seller, as regulated in Articles 1382–1456 of the Civil Code regarding payment. In the COD payment system, a transaction is not considered complete until the buyer pays for the ordered goods to the courier. Therefore, buyers must act in good faith and make payment before opening the package. If the package is opened and the item is deemed unsuitable, the buyer is still required to pay for the order to the courier. Complaints and returns may then be submitted to the seller through the available features on the marketplace where the item was purchased.

Keywords: Liability, Courier Protection, COD